

B-1



**SEMINAR INTERNASIONAL PENDIDIKAN
DAN PERTEMUAN FIP – JIP Se INDONESIA
TAHUN 2005**

DALAM RANGKA DIES NATALIS UNP KE 51



**MEMPERSIAPKAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG
SIAP SUAI**



MAKALAH

**Disampaikan pada Seminar Internasional dan
Pertemuan FIP/JIP se Indonesia serta Dies Natalis
UNP ke 51
di Bukittinggi, 12 – 14 September 2005**

oleh:
Sudiyono, M.Si
FIP Universitas Negeri Yogyakarta

**PENYELENGGARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2005**

MEMPERSIAPKAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG SIAP SUAI

Oleh: Sudyono

Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNY

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hampir tak satupun bentuk kehidupan masyarakat, bahkan kehidupan individu, yang sama sekali tak tersentuh atau tidak dipengaruhi oleh negara. Dalam perkembangannya fenomena negara modern, negara kemudian tidak lagi hanya berperan dalam mengatur atau mengontrol dan menegakkan peradilan, melainkan pula dituntut memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat secara efektif.

Salah satu manifestasi dan konsekuensi dari intervensi negara dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat itu adalah semakin meluasnya pengaruh, serta peran menonjol sektor perpajakan. Melalui kekuasaannya di sektor perpajakan inilah negara kemudian menghimpun dana yang diperlukan untuk menyediakan barang publik (public goods (Riggs, 1997) dan mengongkosi semua operasi yang dilakukan oleh semua jajaran birokrasinya. Sejak itu, peran dan bahkan hakikat dari eksistensi dinas-dinas pemerintah senantiasa dikaitkan dengan penyelenggaraan fungsi pelayanan publik. Pelayanan publik kemudian dianggap sebagai salah satu tanggungjawab politik penting untuk diemban oleh setiap pemerintah (Abdul Wahab, 1998).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan sekarang ini, isu sentral yang berkembang sebetulnya bukanlah pemerintah yang banyak memerintah, atau yang sedikit memerintah atau bahkan sekedar pemerintahan yang baik, sebagaimana dikatakan oleh Osborne dan Gaebler (1992), melainkan pemerintah yang selain semakin dekat pada rakyat, juga benar-benar mampu memerintah. Intinya adalah pemerintah memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan publik yang kompetitif dan berkualitas kepada rakyatnya (Abdul Wahab, 1998). Bahkan kecenderungan global sekarang ini menunjukkan bahwa pemberian layanan yang semakin baik pada sebagian besar rakyat merupakan salah satu tolok ukur bagi pemerintah dan sekaligus kapasitas politik pemerintah dimanapun (World Developed Report, 1997)

Pemberian layanan yang optimal dari pemerintah menuntut kehadiran calon pengabdian atau pelayan profesional. Untuk keperluan dimaksud pemerintah harus meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, tak terkecuali tenaga pendidik dan

** Sudyono: Dosen Administrasi Pendidikan UNY*

tenaga kependidikan melalui pendidikan. Jika hal ini dapat dipenuhi maka bukan tidak mungkin bangsa Indonesia akan dapat berdiri sama tinggi dengan negara-negara seperti Singapura, Korea Selatan dan Taiwan, karena bangsa Indonesia memiliki kekayaan yang melimpah dan tenaga kerja, sementara Negara-negara tersebut hanya memiliki tenaga kerja. Persoalan yang timbul adalah bagaimanakah kita meningkatkan kualitas, dedikasi, logika dan inovasi tenaga kerja termasuk di dalamnya mempersiapkan tenaga kerja yang siap suai, sehingga mereka mampu mengeksplorasi lingkungannya untuk kesejahteraan. Pendidikan merupakan kunci keberhasilan tersebut, walaupun Cohen sebagaimana dikutip oleh Sultan Hamengku Buwono X (2004) dengan lantang mengatakan bahwa tidak ada obat mujarab untuk memecahkan masalah pendidikan yang hanya menggunakan satu pendekatan. Hal ini disebabkan pendidikan merupakan bidang kajian yang bersifat multidimensional. Sekalipun demikian, Inkeles sebagaimana dikutip oleh Goldthorpe (1992) tetap berkeyakinan bahwa penyebab modernisasi individu yang paling efektif adalah pendidikan di sekolah. Pendidikan sebagai rekayasa sosial harus merancang kebijakan dasar yang menyesuaikan kebutuhan di segala bidang yang memerlukan jenis-jenis keahlian, dan keterampilan yang sekaligus meningkatkan produktivitas, kreativitas dan kualitas sumberdaya manusia

B. Bagaimanakah menghadirkan tenaga kependidikan yang profesional.

Pada abad 21 ini kita, bangsa Indonesia dalam perjalanan menapak ke arah globalisasi di semua bidang kehidupan. Era ini diwarnai oleh meluapnya arus informasi melalui berbagai media, yang akan diikuti oleh transformasi mendasar di seluruh bidang kehidupan, termasuk di dalamnya perubahan pola berpikir, teori dan konsep. Peningkatan ekonomi akan menjadikan polarisasi semakin lebar antara kelompok center dan phery-phery. Para ini tidak ada negara yang mampu menghindari dari arus globalisasi, semua akan menjadi bagian dari arus yang mendunia itu.

Bangsa Indonesia dengan penuh keberanian, dengan risiko tinggi telah meratifikasi pasar bebas ASEAN pada Tahun 2003, serta masuk APEC Tahun 2020. Dengan demikian Indonesia telah siap membuka pintu lebar-lebar arus barang dan jasa manusia dari berbagai penjuru dunia. Guna mengantisipasinya perlu memacu diri untuk menghadapi arus barang dan jasa yang masuk dengan keunggulan dan mampu bersaing di bidang barang dan jasa dengan mantap (Salladien, 1996). Tantangan

** Sudiyono: Dosen Administrasi Pendidikan UNY*

lainnya pada satu sisi adalah terjadi kecenderungan semakin bertambahnya pengangguran absolute. Meningkatnya jumlah pengangguran tersebut, bukan semata-mata kesalahan dunia pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah pengangguran terutama di kalangan terdidik dapat ditekan dengan memperbaiki sistem dan perencanaan pendidikan (Fontana,A: 1993).

Pada sisi lain, dalam kaitannya dengan arus globalisasi dalam segala kehidupan, tuntutan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sangat dibutuhkan. Hal ini disebabkan karena merekalah yang akan melakukan kontak langsung dengan generasi muda yaitu terdidik, penentu masa depan. Para pendidik dan tenaga kependidikan tidak hanya berfungsi manakala sedang melakukan proses pendidikan di pendidikan lembaga formal, tetapi juga di masyarakat. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan (UU Nomor: 20 Tahun 2003)

Untuk merealisasikannya dilakukan dengan cara meningkatkan sumber daya manusia yang mumpuni, unggul dan profesional. Sumber daya manusia yang unggul dan mampu ini diharapkan akan diperoleh hasil kerja yang optimal. Guna menghadirkan pendidik dan tenaga kependidikan yang unggul dan mumpuni, satu-satunya hanyalah melalui pendidikan. Untuk mewujudkan kondisi dimaksud pada sisi diperlukan sistem pendidikan yang mendukung, maka pembenahannya di bidang pendidikan amat didambakan, yang berupa pembenahan jenis pendidikan profesional, disain, pola dan arah pendidikan harus segera terwujud.

Pada sisi lain arus globalisasi tersebut juga menyebabkan mengalirnya budaya asing yang kadang kala tidak atau kurang sesuai dengan budaya, adat istiadat dan pola pikir bangsa Indonesia. Karena dipandang perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang tidak hanya profesional, tetapi juga iman dan taqwa, berjiwa Pancasila dan berbudi pekerti luhur. Dengan kata lain tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam menghadapi globalisasi adalah yang memenuhi persyaratan:

1. iman dan taqwa
2. berotak

** Sudiyono: Dosen Administrasi Pendidikan UNY*

3. berkepribadian
4. berdedikasi tinggi
5. ber etos kerja
6. jujur, dan
7. memiliki pemahaman di bidangnya yang mantap.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut maka di dalam proses pendidikan diperlukan latihan-latihan dalam berbagai kompetensi. Kompetensi dimaksud adalah:

1. Kompetensi akademik, yaitu berkaitan dengan kemampuan akademik serta metodologis dalam rangka penguasaan IPTEK.
2. Kompetensi profesional yaitu berkaitan dengan wawasan perilaku dan kemampuan menerapkan IPTEK dalam kehidupan di masyarakat.
3. Kompetensi nilai dan sikap yaitu berkaitan dengan kemampuan untuk selalu menempatkan segala permasalahan dalam kerangka nilai-nilai Pancasila, budaya bangsa dan IMTAQ. Nilai dan sikap ini akan merupakan bumper terhadap polusi yang datang dari luar dan menjadi ciri sumber daya manusia Indonesia.
4. Kompetensi mengatasi perubahan, yaitu kemampuan untuk memahami makna dan hakikat perubahan, kemampuan untuk mengantisipasi kecenderungan perubahan dan kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan perubahan yang dimaksud.

Dalam upaya menghadirkan sumber daya manusia yang profesional sebagaimana dituntut di atas, lembaga pendidikan sebagai lembaga yang ditugasi untuk mencetak calon pendidik dan tenaga kependidikan, bukanlah pekerjaan yang mudah. Mencetak sumber daya manusia yang profesional dalam hiruk pikuknya arus globalisasi, bukan merupakan pekerjaan yang mudah, malahan penuh risiko dan tantangan. Disamping itu, keterbatasan kompetensi staf akademika, belum mapannya program, serta kurang adanya koordinasi antar lembaga (konsumen dan produsen), menjadi penyebab tersendatnya menghadirkan sumber daya manusia yang profesional. Oleh karena itu untuk mengatasinya diperlukan upaya-upaya:

1. Memantapkan koordinasi antar lembaga terkait dengan pemasok dan pengguna tenaga ataupun penopang proses pengadaan sumber daya manusia.

** Sudiyono: Dosen Administrasi Pendidikan UNY*

2. Memantapkan program-program profesi yang searah dengan 4 kompetensi yang diharapkan, dengan jalan melakukan penelitian, pengabdian serta menyusun model-model pembelajaran yang menunjang.
3. Mengembangkan program "Job Placement Center" di masing-masing perguruan tinggi, sehingga memudahkan para alumni untuk memperoleh pekerjaan.
4. Melakukan Tracer Study, sehingga perguruan tinggi dapat menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan (Salladien, 1996)
5. Melakukan *collective bargaining* (Crane, 1982)
6. Memantapkan koordinasi dengan lembaga atau kelompok profesi

C. Isu Pendidikan yang siap pakai

Isu perbaikan sistem dan perencanaan yang selalu berembus, baik dikemukakan oleh para birokrat, maupun para pengguna tenaga, termasuk tenaga kependidikan adalah harus terjadi "keterkaitan dan kesepadanan". Dengan kata lain, sistem pendidikan dan perencanaannya harus menghasilkan lulusan yang siap pakai. Yang dimaksud dengan istilah "siap pakai" adalah para lulusan harus segera mengenali dan menguasai semua permasalahannya yang dihadapi dalam pekerjaannya serta menerapkan ilmu yang dipelajari di lembaga pendidikan guna menemukan pemecahannya.

Realitas menunjukkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat menuntut penguasaan ilmu dasar. Fasilitas pendukung di lembaga pendidikan formal tidak selalu dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemerintah dan lembaga pendidikan formal dalam penyediaannya. Oleh karena itu diperlukan pendidikan yang memberikan bekal kepada para peserta didik agar mampu menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi persoalan rutin dalam bidang yang dipelajarinya dan mengembangkan cara baru untuk menghadapi berbagai persoalan yang sedang dan sudah berkembang di lapangan. Dengan demikian tugas pendidikan adalah memberikan bekal kepada peserta didik agar potensinya berkembang secara wajar, optimal, dan bersifat adaptif dalam menghadapi berbagai permasalahan kelak setelah menamatkan studinya. Melalui pendidikan yang sudah dirancang untuk siap pakai tersebut sifat dasar skeptis,

** Sudiyono: Dosen Administrasi Pendidikan UNY*

eksploratif, dan juga kreatif bisa berkembang dan menemukan artikulasinya dalam proses belajar mengajar sewaktu mengikuti proses belajar mengajar (Salladien, 1996). Namun demikian, realitasnya pendidikan kita masih banyak yang berorientasi pada pengenalan dan penguasaan fakta, kurang mendidik dan kurang mengajarkan proses berpikir lateral dan kurang profesional, sehingga sifat dasar yang berupa eksploratif, mandiri, inovatif dan profesional kurang berkembang.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU No: 20 Tahun 2003). Ini berarti pendidikan harus membentuk manusia seutuhnya. Karena itu diperlukan pendidikan yang holistik. Pendidikan ini diperlukan untuk dapat menghasilkan alumni yang memiliki dasar keilmuan yang kuat, kreatif, inovatif, profesional serta memiliki sifat optimis dan adaptif di lapangan kerjanya. Secara konseptual, pendidikan yang holistik ini menurut Salladien (1997) akan menciptakan pembaharuan wawasan di bidang pendidikan yaitu:

1. menekankan prinsip bernalar secara global tetapi tidak melepaskan lingkungannya
2. memberikan makna efisiensi yang semata-mata tidak berkonotasi ekonomis, tetapi juga mengutamakan keserasian, lingkungan, solidaritas dan moralitas, dan
3. memiliki wawasan modern dalam arti mengembangkan dirinya untuk berprestasi (Mc Donald, M. 1994).

Secara teknis akademis penerapan pendidikan yang bersifat holistik, yaitu pertama pendidikan hendaknya memuat kurikulum yang bersifat universal yang dapat memberikan dasar logika dan empiris sifatnya, sehingga tidak terpengaruh perkembangan teknologi semata serta beraspek edukatif yang bisa disesuaikan dengan kemajuan ilmu dan teknologi, dan kedua dunia pendidikan (formal) perlu menyelenggarakan program pelatihan, karena pendidikan selalu ketinggalan dibandingkan dengan perkembangan ilmu dan teknologi (Squire Lyn 1996).

Kesimpulan

1. Lembaga pendidikan seharusnya memberikan bekal kepada para peserta didik untuk mampu menyesuaikan diri (siap suai)

** Sudiyono: Dosen Administrasi Pendidikan UNY*

2. Para perencana pendidikan hendaknya memikirkan program kerja serta sistem pendidikan yang fleksibel.
3. Strategi pendidikan harus diarahkan pada upaya peningkatan dalam segala bidang kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin, 1998. *Reformasi Pelayanan Publik Menuju Sistem Pelayanan Responsip dan berkualitas*, Malang, Pasca Sarjana Universitas Brawijaya

Goldthorpe, JE, (1992). *Sosiologi Dunia Ketiga, Kesenjangan dan Pembangunan*, (Alih Bahasa Sakidijo), Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama

Osborne, David and Ted Gaebler, (1992), *Reinventing Government: How the Interpreneurial Spirit is Transforming the Public Sector Schoolhouse to Statehouse*, City Hall on Pentagon Reading, MA, Adison Wesley

Riggs, Fred. W. (1997), *Modernity and Bureaucracy*, *Public Administration Review*, July/August, Vol. 57. No.4

Salladien, (1996), *Pendidikan Berorientasi pada Profesi merupakan Upaya menghadirkan Tenaga Kerja yang Profesional di Era Liberalisasi Ekonomi yang Penuh Dinamika*, Malang, FPIPS Malang.

....., (tth). *Pendidikan Berorientasi Dunia Kerja sebagai Upaya menghadirkan SDM yang Berkompetensi*

Squire, Lyn (1996), *Kebijakan Kesempatan Kerja di Negeri-Negeri Sedang Berkembang*, (terjemahan), Jakarta, UIP

Sultan Hamengku Buwono X, (2004), *Muatan Nilai-Nilai Kultural dalam Pendidikan , Seminar Nasional peningkatan Kualitas Pendidikan melalui Pengembangan Kultur Sekolah*, Jogyakarta, Pasca Sarjana UNY, 14 Juni 2004

Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*

World Develwoped Report, (1997), *The State in a Changing World*, Publish for the World Bank, Oxford University Press